

# IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA LARINGGI KABUPATEN SOPPENG

Nur Fitra Tsania<sup>1\*</sup>, Budi Setiawati<sup>2</sup>, Sitti Rahmawati Arfah<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*This study aims to determine the implementation of the cash transfer program (BLT) in Laringgi village. The type of research used is a qualitative research method with a descriptive type of research. The BLT program aims to reduce poverty. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The results of the study are the implementation of the direct cash assistance program (BLT) in Laringgi Village, consists of four aspects, namely (1) Communication, divided into three, namely: First, the transmission/channel of communication from the village government has been effective in distributing direct cash assistance (BLT), the second is clarity of socialization. has been evenly distributed while in the third the consistency is still lacking. (2) The disposition/attitude is quite good, the people who receive the assistance are very happy. (3) The resources consist of human resources that are quite good in the direct cash assistance program (BLT), the facilities and infrastructure are adequate. (4) Bureaucratic structure, divided into two, namely SOP and Fragmentation, both of which are good in the direct cash assistance program.*

**Keywords:** *community, direct cash assistance, implementation, poverty*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Laringgi. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Program BLT ini tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Laringgi, terdiri dari empat aspek yaitu: (1) Komunikasi, terbagi menjadi tiga yaitu Pertama transmisi/penyalur komunikasi pemerintah desa sudah efektif dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) ,yang kedua kejelasan sosialisasinya sudah merata sedangkan yang ketiga konsistensi masih kurang; (2) Disposisi/sikap cukup baik masyarakat yang mendapatkan bantuan sangat senang; (3) Sumberdaya terdiri dari Sumberdaya manusia cukup baik dalam program bantaun langsung tunai (BLT), sarana dan prasaranya sudah memadai; (4) Struktur Birokrasi, terbagi atas dua yaitu SOP dan Fragmentasi keduanya sudah baik dalam program bantuan langsung tunai.

**Kata kunci:** bantuan langsung tunai, implementasi, kemiskinan, masyarakat

---

\* nurfitratsania@gmail.com

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimana pedoman tersebut memiliki Tujuan nasional utama ialah mewujudkan Kesejahteraan rakyatnya. Indikator yang menandakan suatu Negara memiliki rakyat yang sejahtera adalah memiliki rakyat yang cerdas, adanya suatu keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bukan hanya kesejahteraan materi yang menjadi indikator sejahteranya Negara namun kualitas kesehatan penduduk pun merupakan tanggung jawab yang wajib diperhatikan oleh pemerintah (Trifena, 2020).

Kemiskinan merupakan fenomena global, yaitu kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Mendengar kata kemiskinan, sudah pasti dapat diketahui bahwa seorang yang dikatakan miskin jika dirinya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan kata lain, orang tersebut hidupnya serba kekurangan serta tidak mempunyai harta yang lebih untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari (Lesawengan dkk, 2020).

Upaya peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat miskin diwujudkan agar masyarakat tersebut dapat hidup layak serta mengembangkan dirinya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan yaitu membuat berbagai model program maupun pemberian bantu Pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal baru. Beragam skema bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Hal ini sejalan dengan teori *Welfare State*, merujuk dari Alfitri (2012) konsep *Welfare State* dalam Encyclopedia Britannica yakni terkait tanggung jawab negara sebagai garda terdepan dalam melindungi serta memakmurkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya. an kepada masyarakat miskin.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang ataupun barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat; (2) terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual; (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi); dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu

mereka berusaha mengejar tujuannya.

Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntun manager dalam memutuskan komitmen.

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja,

pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Menurut BPS (2012), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari kedua defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-harinya seperti pangan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang, baik secara finansial maupun semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikategorikan miskin bilamana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimnya, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dimensi ekonomi dapat diukur dengan nilai

rupiah meskipun harganya selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pada tingkat inflasi rupiah. Kemelaratan dan batas ini ditentukan oleh kebutuhan hidup yang minimal perlu dipenuhi bagi kehidupan yang sederhana.

Bantuan Langsung Tunai adalah program dari pemerintah akibat dicabutnya subsidi BBM dan dialihkan kepada rakyat miskin agar di Indonesia berkurang, dengan adanya BLT ini diharapkan kemakmuran penduduk semakin merata. Penyeleksian masyarakat yang mendapatkan BLT selama ini masih menggunakan cara manual yang dapat membantu dalam mengambil suatu keputusan secara cepat, tepat, dan akurat. Dari penelitian ini dihasilkan program aplikasi ini telah berjalan dengan baik dan dapat membantu badan pusat statistik dalam proses penerimaan dana BLT (Dyah, dalam sophan, 2018).

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak bersyarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2004. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, pada 2008 pemerintah

kembali melaksanakan Program Bantuan langsung Tunai (BLT) seperti pada 2005. Langkah ini ditempuh sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Iping, 2020).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program Pemerintahan SBY untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebijakan ini merupakan program subsidi pemerintah setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tahun lalu. Kenaikan BMM diambil sebagai bentuk penyelamatan anggaran Negara akibat naiknya harga minyak dunia saat itu (Maenanda 2014 dalam iping, 2020).

Soal BLT sendiri sebenarnya sudah sering dibahas melalui media masa dimana program ini dinilai kurang efektif oleh banyak pihak, jadi sempat timbul pro dan kontra. Ada yang menilai bahwa pemberian uang secara tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 3 bulan sekali itu tidak membantu banyak. Belum lagi, diberitakan mengenai keruwetan sistem pembayaran, tata cara penerimaan uang BLT dan sebagainya Singkatnya, banyak sekali timbul pro dan kontra mengenai BLT ini. Selain ketidakefektifan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah maupun sistem penyelenggaraannya ketidaktepatan

asaran, banyak pihak mensinyalir dana yang digunakan untuk program Bantuan Tunai Langsung ini menggunakan dana pinjaman (Tempo, 23 Maret 2009 dalam Midiastuty 2009).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu bentuk bantuan dari pemerintah sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM ini berimbas kepada kehidupan masyarakat luas termasuk kalangan masyarakat miskin. Masyarakat mendapatkan dampak langsung dari kenaikan harga BBM, sehingga kelompok masyarakat ini mendapatkan bantuan BLT (Sopfan, dkk 2018).

Adapun indikator Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), yang pertama yaitu komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

Yang kedua yaitu disposisi pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan

untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa: jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Yang ketiga yaitu sumber daya. sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Sumber daya merupakan suatu hal terpenting untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik. terdapat beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumberdaya bisa berjalan dengan baik, yaitu: a. Staf, atau lebih tepat dikenal *Street-level Bureaucrats*. Kegagalan seringkali terjadi pada implementasi kebijakan, salah satunya ditimbulkan oleh pegawai/staf yang kurang memadai, tidak kompeten pada bidangnya, serta mencukupi; b. informasi, pada implementasi kebijakan

informasi memiliki 2 bentuk, yaitu (1) informasi yang bekerjasama dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus tahu apa yang akan mereka lakukan pada saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan; (2) Informasi mengenai data kepatuhan dari pada pelaksana terhadap aturan serta regulasi pemerintah yang sudah ditetapkan. Implementor perlu tahu apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum; c. Wewenang, pada dasarnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah bisa terlaksana. Kewenangan ialah otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik; d. Fasilitas, Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, serta mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, namun tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana serta prasarana), maka implemementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Yang keempat yaitu struktur birokrasi Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: 1) Birokrasi diciptakan sebagai

instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*). 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni (SOP) dan fragmentasi”.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian

kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu bersifat menggambarkan dan melukiskan sesuatu hal yang di dapat dari lapangan kemudian menjelaskannya dengan kata-kata.

Tipe penelitian deskriptif dengan penelitian deskriptif peneliti ingin membuat gambaran secara menyeluruh tentang implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan *problem* sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) Tingkat hidup masyarakat meningkat; (2) Terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual; (3) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi); dan (4) Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara

etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Implementasi Peraturan Kepala Laringgi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianalisis menggunakan model implementasi Edward III. Kebijakan diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga kebijakan untuk menangani permasalahan yang sedang dihadapi perlu kecermatan dan ketepatan serta kecepatan waktu dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat melakukan atau tidak melakukan atas sesuatu yang terjadi merupakan sebuah kebijakan.

### **Komunikasi**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus kajian yang sangat krusial. Bersifat krusial karena

bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo 2010:85). Beberapa peristiwa dari program kebijakan memerlukan hubungan yang baik antar-instansi terkait melalui dukungan komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, diperlukanlah koordinasi dan kerja sama yang baik antar-instansi bagi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

Komunikasi adalah perbincangan yang dilakukan antara berbagai pihak untuk membuktikan suatu keaslian informasi yang berasal dari 2 pihak yaitu pihak dalam dan luar. Komunikasi dalam penyaluran BLT antara pemerintah Desa Laringgi dengan masyarakat cukup aktif. Pemerintahan desa dalam menyampaikan tentang rencana penyaluran BLT dengan memberikan arahan dan sosialisasi secara online dan berjenjang melalui Ketua RT/RW. Dalam sosialisasi dijelaskan bagaimana prosedur penyaluran dan kriteria penerima manfaat dari BLT ini. Pemerintah desa sebagai pelaksana BLT DD di Desa Laringgi melakukan tugas agar masyarakat melaksanakan dan menaati peraturan terkait BLT.

Sesuai hasil wawancara dan observasi, pemerintah desa laringgi menyalurkan komunikasinya dengan masyarakat sudah efektif melalui media ataupun mendatangi langsung kepada penerima BLT di Desa laringgi.

### **Disposisi**

Menurut Edward III (dalam Nugroho, 2014:637), disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tapi juga dirinya. Mereka tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya. Terkait dengan konsep tentang disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan, maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor disposisi (sikap pelaksana) dalam implementasi Program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Laringgi sudah baik, penuh komitmen dan kesediaan untuk mensukseskan program-program desa. Program BLT didukung oleh semua

unsur pemerintahan desa (aparatur desa, BPD, kepala dusun, RT/RW dan tokoh masyarakat), sebab mereka merasakan dampak dan manfaat yang positif dari kebijakan ini.

Sesuai wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa implementasi program bantuan langsung tunai ini sangat didukung oleh masyarakat karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

### **Sumber Daya**

Implementasi sistem informasi publik berbasis website diperlukan adanya sumber daya yang baik. Faktor ini sangat menentukan untuk mendukungnya keberhasilan kebijakan. Menurut Edward III (1980:53), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Pendekatan sumber daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi, sumber daya utama dalam kebijakan adalah aparatur/pegawai atau sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai maka memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya merupakan penyebab tidak terlaksana dengan baik implementasi kebijakan. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia sudah cukup dalam penyaluran ini yakni sebanyak 81 masyarakat miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai dari dua dusun.

### **Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik utama dari Struktur birokrasi, yakni SOP dan fragmentasi. Karakteristik Struktur Birokrasi dalam implementasi sistem informasi publik berbasis *website* akan dijelaskan sebagai berikut: (a) *Standart Operational Procedure* (SOP) *Standart Operational Procedure* (SOP) menjadi faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan implementasi dikarenakan dengan adanya SOP maka kebijakan dapat dilaksanakan dengan jelas dan seragam karena sudah terdapat prosedur yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, SOP program bantuan langsung tunai di Desa Laringgi sudah berjalan dengan efektif dan sangat baik.

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan diperkuat dengan penelitian Anta Kusuma & Simanungkalit, (2022) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.

### **Fragmentasi**

Para aparatur kebijakan dalam menajalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Penyebaran tanggungjawab tersebut dapat diwujudkan dalam kinerja antara bagian yang satu dengan bagian lain, antara bagian tersebut saling bekerjasama

dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, misalnya, Bagian Informasi berkewajiban untuk menyetorkan data yang terkumpul untuk meningkatkan akselerasi pelayanan ke bagian pengolahan data dan sebaliknya. Penyebaran tanggungjawab para aparatur desa taeng saling membantu, melengkapi dan mendukung satu sama lain dengan tujuan agar implementasi program ini berjalan dengan baik.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara bersama informan serta melakukan observasi langsung di Desa Laringgi kabupaten Soppeng, maka disimpulkan bahwa: komunikasi program yang dilakukan oleh pemerintah berupa program bantuan langsung tunai di desa Laringgi dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif karena program ini telah berhasil berjalan seitan tahunnya dan bisa membantu masyarakat miskin.

Disposisi/sikap masyarakat sangat antusias dan mendukung adanya program bantuan langsung tunai (BLT) ini karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan dengan adanya program ini angka kemiskinan di Desa Laringgi akan berkurang.

Sumber Daya terdiri dari Sumber daya manusia dengan jumlah masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai sebanyak 81 orang dari 2 dusun yaitu Dusun Welonge Dan Dusun Bera, dari segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk pengimplementasian program bantuan langsung tunai (BLT) ini.

Struktur Birokrasi terkait dengan SOP implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) sudah terstruktur dengan baik dan fragmentasi pemerintah desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidangnya.

### REFERENSI

- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman, T. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(05), pp. 874-885.
- Ananda, Riski. (2021). *Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*. Kalimantan Tengah (Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang). <http://eprints.ipdn.ac.id/6276/>
- Anggraini, Trifena. (2020). *Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan* (Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

- (IPDN) Jatinangor, Sumedang).  
<http://eprints.ipdn.ac.id/6353/>
- Asmaroini, A. P. (2012). *Efektivitas Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Kampung Idiot di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, Universitas Negeri Malang, Malang).  
<http://repository.um.ac.id/51634/>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), pp. 516-526.
- Hasbii, I. (2008). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus* (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang).
- Baria, Kahirul. (2019). *Efektivitas Pelayanan Kartu Macca di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Setyawardani, D. T. R., Paat, C. J., & Lesawengen, L. (2020). Dampak bantuan PKH terhadap masyarakat miskin di kelurahan Bumi Nyiur kecamatan Wanea kota Manado. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture* 13(2).
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Novianto, E. (2008). Persepsi Masyarakat Tentang Subsidi Langsung Tunai (Studi Kasus Penanggulangan Kemiskinan di Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong). *Jurnal JEMI*, 18(2), pp. 43-57
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, kuantatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.